

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan (jasa) asasi yang diperlukan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya. Definisi tersebut menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dari rohani, aspek diri (individualitas) dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan sosial dan alamnya (horizontal), dan dengan tuhan (vertikal)

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika seperti saat ini dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu political will dan dinamika sosial. Political will sebagai suatu produk dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini tengah di persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb). Kemudian dalam cakupan yang lebih operasional, maka peraturan menteri; peraturan daerah yang dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah. Adapun berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya

merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (negara) tersebut (input-proses-output). Demikian, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat. Pendidikan pada akhirnya diarahkan ke perubahan karakter penduduk.

Berdasarkan data penduduk, maka Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk sejumlah 256 juta. China menduduki rangking pertama dengan jumlah penduduk sebanyak 1,4 miliar, disusul di posisi kedua yaitu India dengan jumlah penduduk 1,3 miliar, posisi ketiga Amerika serikat sebesar 321 juta penduduk dan posisi kelima ditempati oleh Brazil dengan jumlah populasi sebesar 204 juta penduduk. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Beberapa Negara di Dunia**

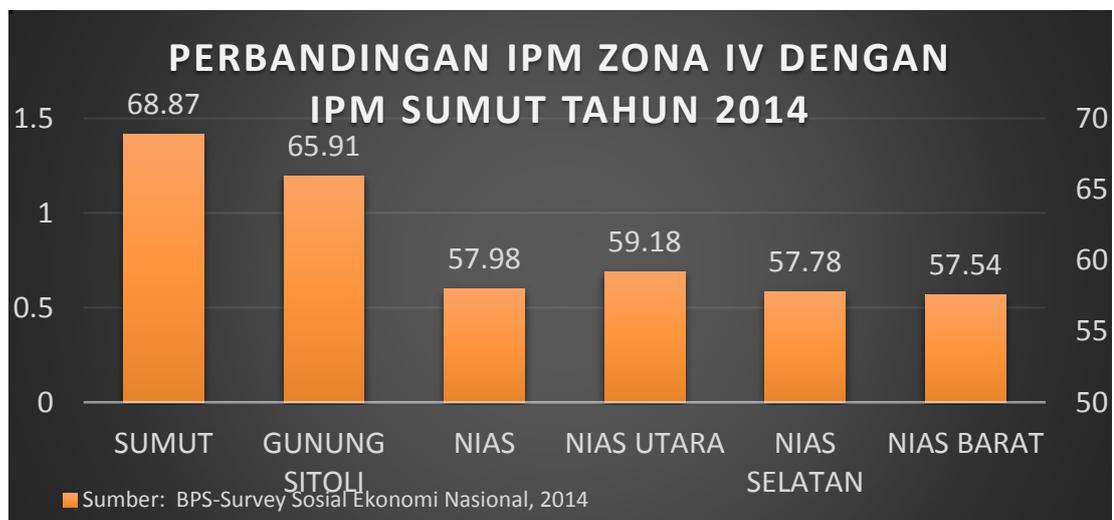
Negara	Jumlah Penduduk(jiwa)	Ket.
(1)	(2)	(3)
1. China	1,361,512,535	
2. India	1,251,695,584	
3. United States	321,362,789	
4. Indonesia	255,993,674	
5. Brazil	204,259,812	
6. Pakistan	199,085,847	
7. Nigeria	181,562,056	
8. Bangladesh	168,957,745	
9. Russia	142,423,773	
10. Japan	126,919,659	

Sumber: Cencus. Gov (2015)

Kemudian berdasarkan laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2013, menyatakan bahwa Indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Tahun 2012 Indonesia menempati urutan ke-121 dari 187 negara IPM tertinggi di dunia pada tahun 2012 adalah Negara Kanada.

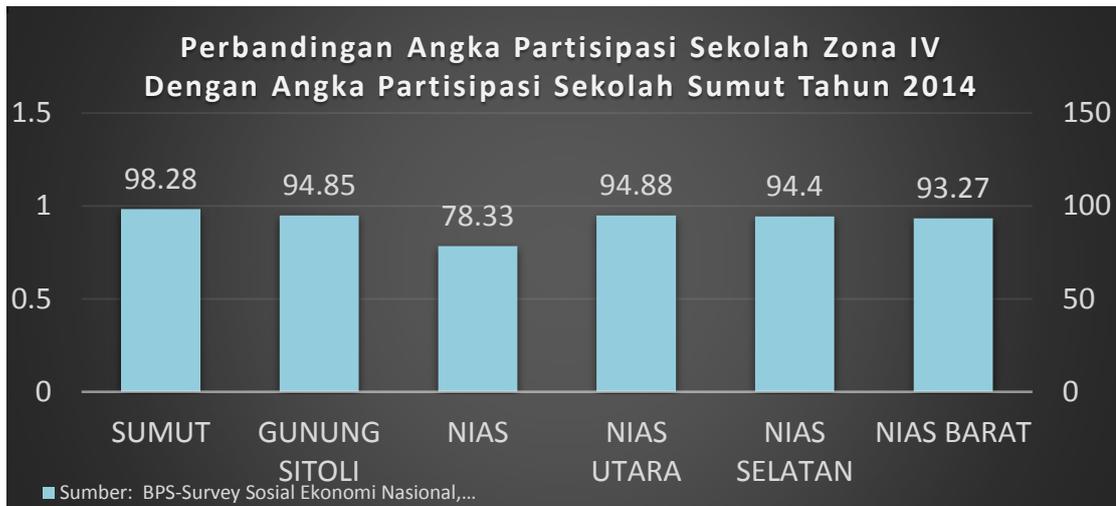
Data terbaru pada tahun 2015 IPM Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 69,51 dan Kabupaten Nias Selatan mencapai 58,85 dan angka ini salah satu terendah di Sumatera Utara dan terendah keempat se-Kepulauan Nias. Jika diurutkan ranking di se-Kepulauan Nias, maka IPM Kota Gunungsitoli mencapai 66,41 sebagai ranking pertama, pada posisi kedua Kabupaten Nias Utara sebesar 59,88 dan posisi ketiga Kabupaten Nias dengan nilai IPM 58,85 serta posisi terakhir Kabupaten Nias Barat dengan nilai IPM sebesar 58,25. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar ini.

**Gambar 1.1**



Selanjutnya jika dikaji Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Nias Selatan, diketahui bahwa APS Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2014 mencapai 94,4 % artinya pada tahun 2014 tamatan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sebesar 6 %, Lebih jelas dapat diketahui pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2



Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya.

Langkah yang ditempuh pemerintah pun saat ini dengan pencanangan pendidikan gratis agar semua warga Negara mampu merasakan pendidikan yang layak meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Inilah yang jadi salah satu program pada pemerintahan Bupati Nias Selatan periode 2011-2016 yakni Pemerintahan Drs. Idealisman Dachi termasuk dalam jajaran pemerintah yang mengambil langkah awal dari inisiatif pemerintah pusat untuk menggratiskan pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi.

Sejak tahun 2011, dimulai pelaksanaan program pendidikan yang disebut secara legal formal adalah program pembebasan biaya pendidikan sesuai Perda Kabupaten Nias Selatan No. 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Kemudian adanya Peraturan Bupati Nias Selatan No. 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No. 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan yang sering disebut "Pendidikan Gratis".

Pada awal mengimplementasikan program ini sangat sulit karena tidak ada pembanding atau pedoman, tentunya lebih banyak pelajari aturan-aturan yang mendasarinya seperti UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, sehingga pelaksanaan program ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah ada Perda dan Perbup, dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, dianggarkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

Yang digratiskan itu sebenarnya biaya pendidikan yaitu semua biaya di kampus atau di sekolah itu dibebaskan artinya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Sementara biaya hidup itu masing-masing peserta didik yang akan menanggungnya. Namun ada juga mahasiswa/i dari Nias Selatan yang kuliah di PT di luar wilayah Nias Selatan, yang juga biaya hidupnya ditanggung atau didisubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penulis tertarik meneliti “EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN NIAS SELATAN“

## **1.2. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

### **1.2.1. Fokus**

Fokus penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan.

### **1.2.2. Sub-fokus**

Sub-fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Program pendidikan di daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
- b. Alokasi dana pendidikan dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang banyak.
- c. Kemampuan ekonomi masyarakat di Nias Selatan untuk membiayai kuliah/sekolah anaknya.
- d. Peningkatan aspirasi pendidikan di Kabupaten Nias Selatan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Didasari kepada latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Apakah pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan dapat dimanfaatkan secara efektif?”

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendapatkan gambaran bagaimanakah proses penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Untuk mengkaji bagaimanakah sikap orangtua dan dampak kebijakan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat akademik. Diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Manfaat praktis. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami kebijakan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan.